



**STRICTLY CONFIDENTIAL/ TERBATAS
EMBARGO S.D 6 JULI 2017**

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

POKOK-POKOK RAPBNP 2017



Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI

JAKARTA, 6 JULI 2017



Pokok Bahasan

1

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2017

2

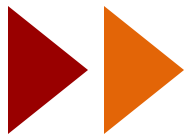
**POKOK-POKOK PERUBAHAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM
RAPBNP 2017**





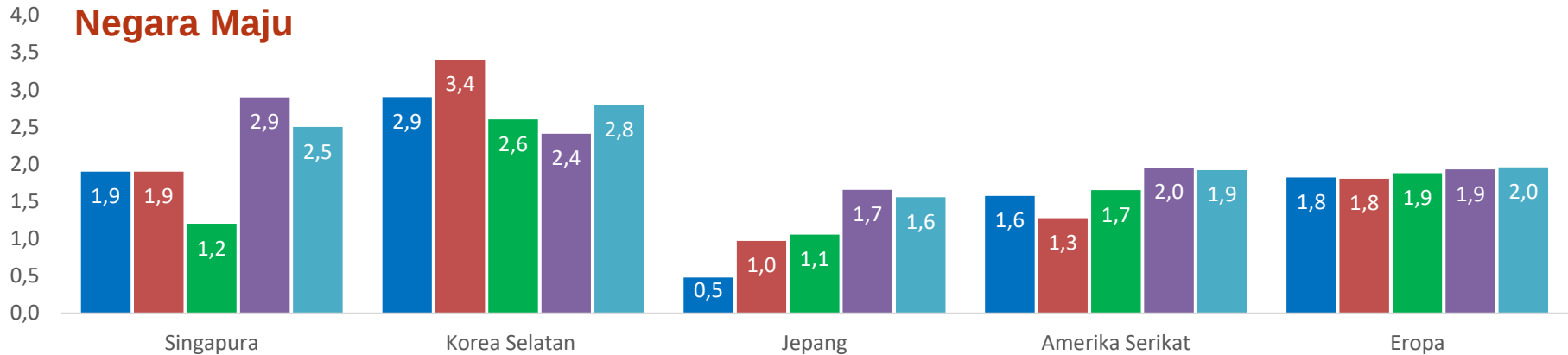
1

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2017

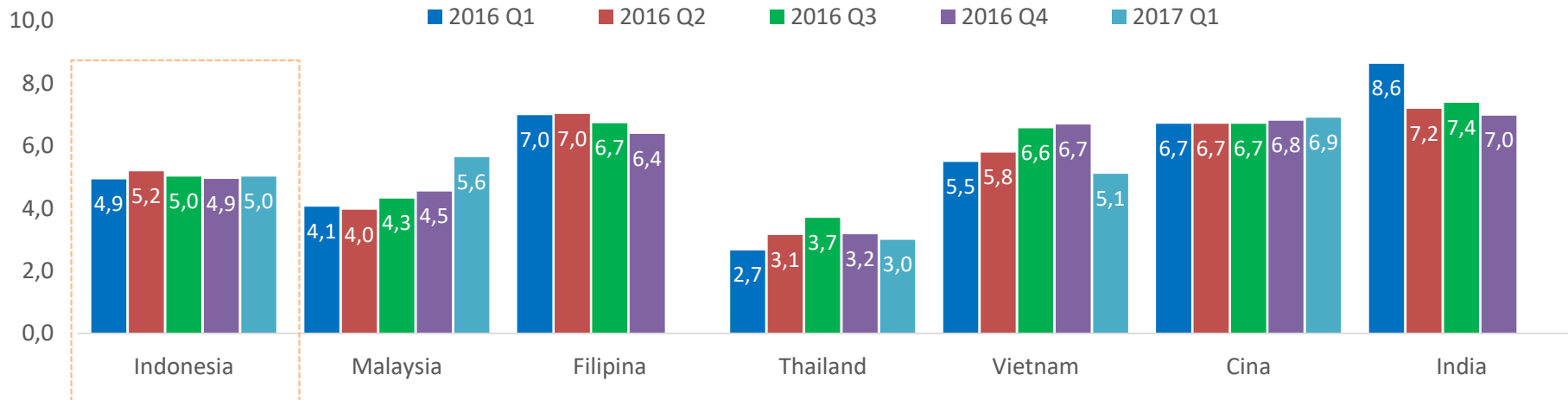


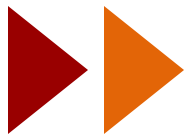
Pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia cukup stabil di triwulan pertama 2017 (% yoy)

Meskipun di tengah ketidakpastian global yang bersumber dari sisi kebijakan dan geopolitik



Negara Berkembang



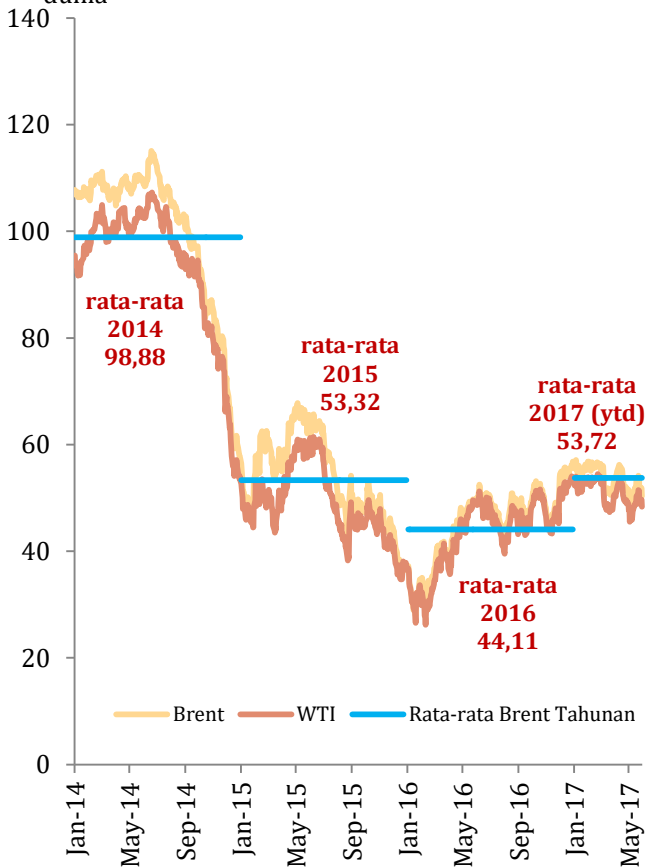


Secara umum harga komoditas tahun 2017 melanjutkan tren peningkatan terbatas

Sehingga turut mendorong aktivitas perdagangan internasional

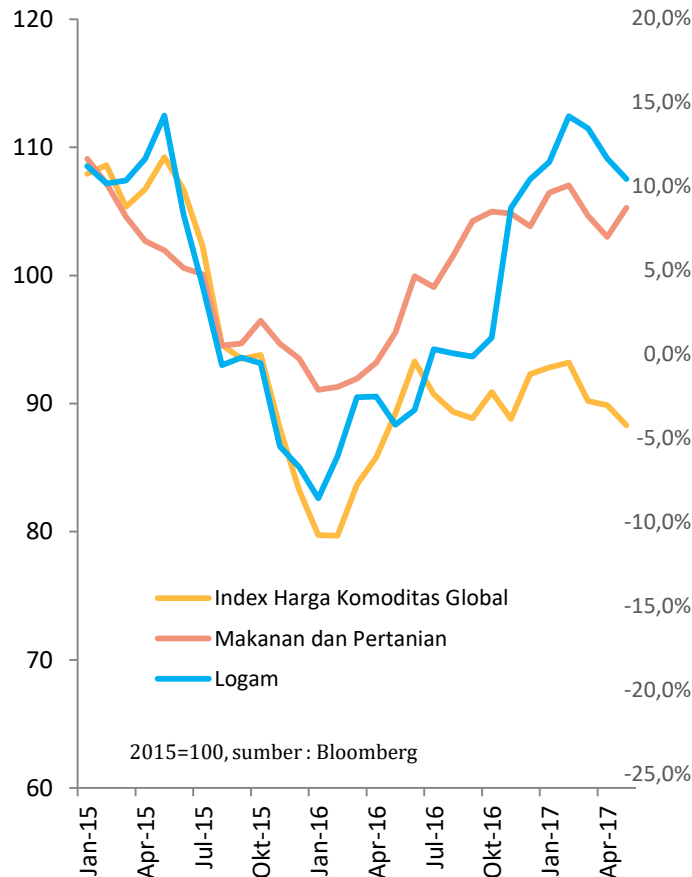
Pergerakan harga minyak dunia

Ketegangan diplomatik yang terjadi di kawasan teluk, tidak berdampak signifikan terhadap harga minyak mentah dunia

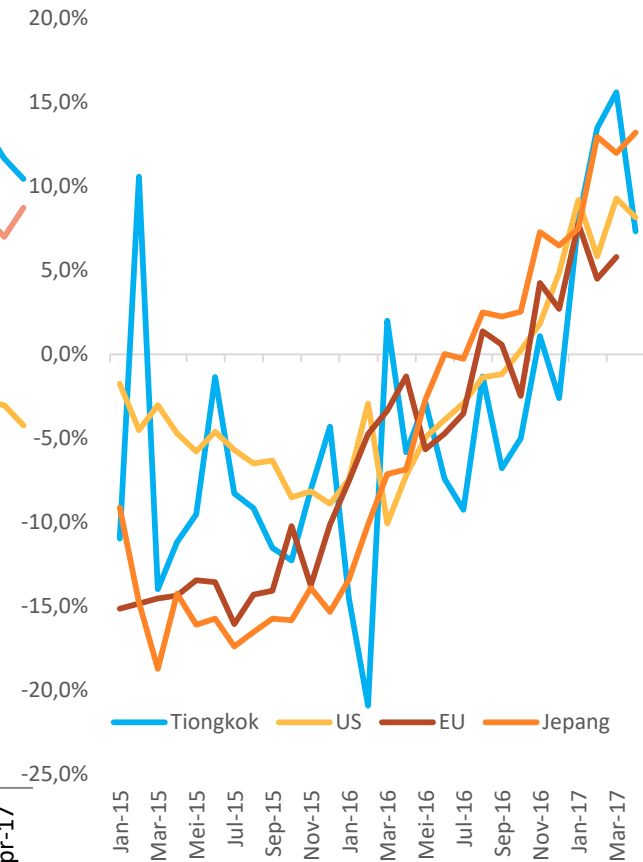


sumber : Bloomberg dan CEIC

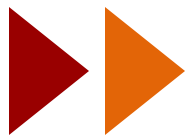
Commodity Price Index



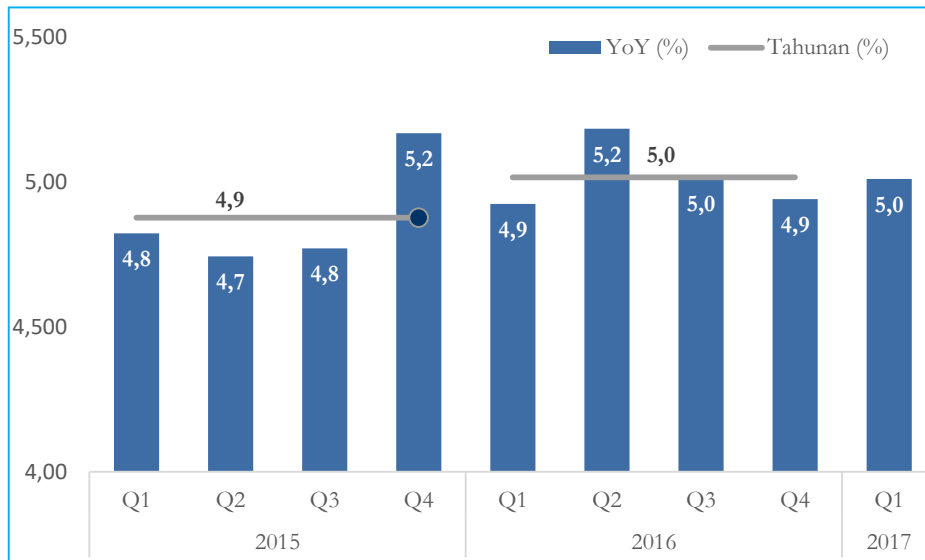
Pertumbuhan Total Perdagangan (% , yoy)



sumber : CEIC

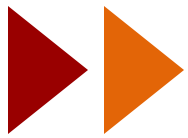


Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2017 sebesar 5,01 persen, lebih tinggi dibandingkan kuartal yang sama 2 tahun sebelumnya, didukung oleh perbaikan ekspor dan impor ...



- **Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT tumbuh stabil** didukung oleh pertumbuhan komponen LNPRT yang cukup tinggi.
 - ✓ Tingkat inflasi relatif stabil meskipun terjadi kenaikan cukup tinggi di awal tahun.
 - ✓ Penyelenggaraan pilkada dan kegiatan organisasi sosial.
- **PMTB tumbuh stabil** seiring dengan pertumbuhan indikator PMA PMDN, penjualan semen dan impor barang modal.
- **Konsumsi Pemerintah** tumbuh positif sejalan dengan realisasi penyerapan anggaran di awal tahun yang cukup baik.
- **Ekspor dan Impor** tumbuh positif dan relatif tinggi.
 - ✓ Kinerja ekspor didukung oleh peningkatan permintaan negara mitra dagang utama, terutama ekspor barang industri.
 - ✓ Kinerja impor didukung oleh pertumbuhan positif seluruh jenis barang.

Komponen Pengeluaran (YoY)	2015				2015	2016				2016	2017
	Q1	Q2	Q3	Q4		Q1	Q2	Q3	Q4		
Kons. Rumah Tangga dan LNPRT	4,7	4,7	5,0	5,0	4,8	5,0	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Kons Pemerintah	2,9	2,6	7,1	7,1	5,3	3,4	6,2	-2,9	-4,0	-0,1	2,7
PMTB	4,6	4,0	4,9	6,4	5,0	4,7	4,2	4,2	4,8	4,5	4,8
Ekspor	-0,7	-0,3	-0,9	-6,4	-2,1	-3,3	-2,2	-5,6	4,2	-1,7	8,0
Impor	-2,6	-7,4	-6,6	-8,7	-6,4	-5,1	-3,2	-3,7	2,8	-2,3	5,0
PDB	4,8	4,7	4,8	5,2	4,9	4,9	5,2	5,0	4,9	5,0	5,0

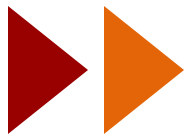


Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan lebih baik dibandingkan target APBN 2017

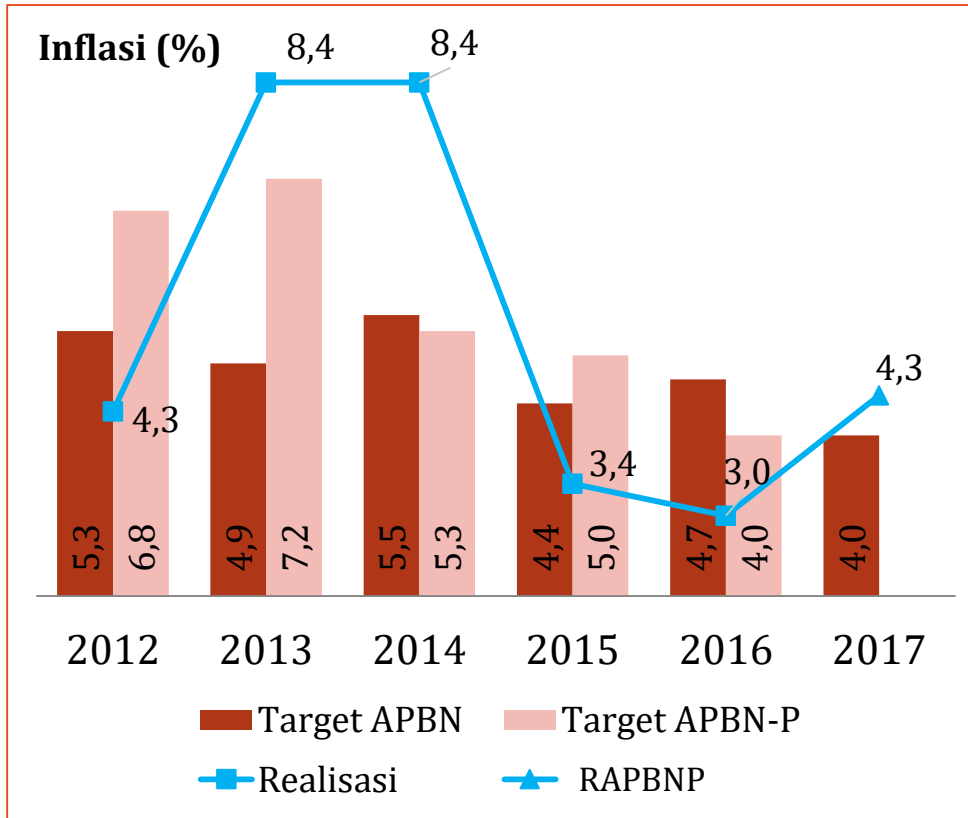
komponen utama pertumbuhan diupayakan tumbuh lebih tinggi pada triwulan III dan IV

	2015	2016	2017	
			APBN	RAPBNP
Konsumsi RT & LNPRT	4,8	5,0	5,0	5,1
Konsumsi Pemerintah	5,3	-0,1	4,8	4,6
PMTB	5,0	4,5	6,0	5,4
Ekspor	-2,1	-1,7	0,1	4,8
Impor	-6,4	-2,3	0,2	3,9
PDB	4,9	5,0	5,1	5,2

- Tingkat inflasi yang stabil dan kegiatan sosial masyarakat yang tetap tinggi mendukung kinerja konsumsi rumah tangga dan LNPRT
- Pertumbuhan investasi yang tinggi membutuhkan dukungan komponen lain, baik Pemerintah maupun Swasta:
 - ✓ Pembangunan infrastruktur, komitmen investasi asing, iklim investasi domestik, kebijakan dan kondisi ekonomi negara maju dan berkembang lainnya.
- Peningkatan investasi meningkatkan pertumbuhan impor untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan barang modal



Tingkat Inflasi tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,3 persen (yoy)



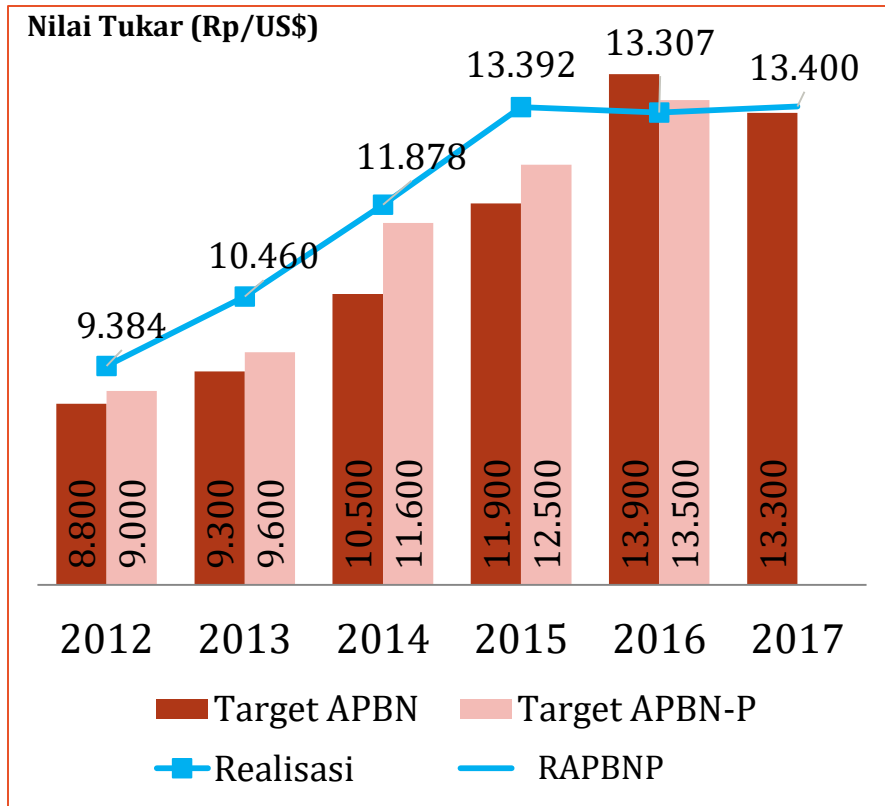
Sumber: BPS, Kementerian Keuangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi:

- *Baseline* perhitungan inflasi relatif rendah.
 - tren inflasi dan inflasi inti yang menurun didukung perbaikan kondisi domestik
 - pembangunan infrastruktur berdampak pada perluasan kapasitas produksi dan *output potensial*
 - perkiraan peningkatan suku bunga dalam negeri sebagai respons rencana kenaikan *federal funds rate*
- Risiko tekanan pada semester I 2017, berasal dari komponen *administered price*.
- Faktor lainnya adalah faktor musiman, antara lain HBKN yang juga berdampak pada komponen inti dan *volatile food*, serta pergerakan harga komoditas dunia, terutama minyak bumi.
- Pemerintah akan menjaga keseimbangan *supply-demand* dan perbaikan distribusi di pasar domestik, terutama komoditas pangan untuk mengendalikan komponen *volatile food*.



Nilai Tukar Rupiah tahun 2017 diperkirakan akan mencapai Rp13.400/US\$

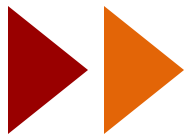


Faktor-faktor yang mendorong penguatan nilai tukar rupiah, antara lain:

- Kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik : Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi (a.l: akselerasi proyek infrastruktur), terjaganya tingkat inflasi, cadangan devisa yang cukup tinggi, dan penurunan defisit transaksi berjalan.
- Penguatan ekonomi Amerika Serikat yang berkontribusi positif dalam perekonomian di sektor riil,
- Masih berlangsungnya *quantitative easing* yang diberlakukan oleh ECB dan BoJ menyebabkan potensi capital inflow masih cukup tinggi.
- Upgrade* rating oleh S&P.

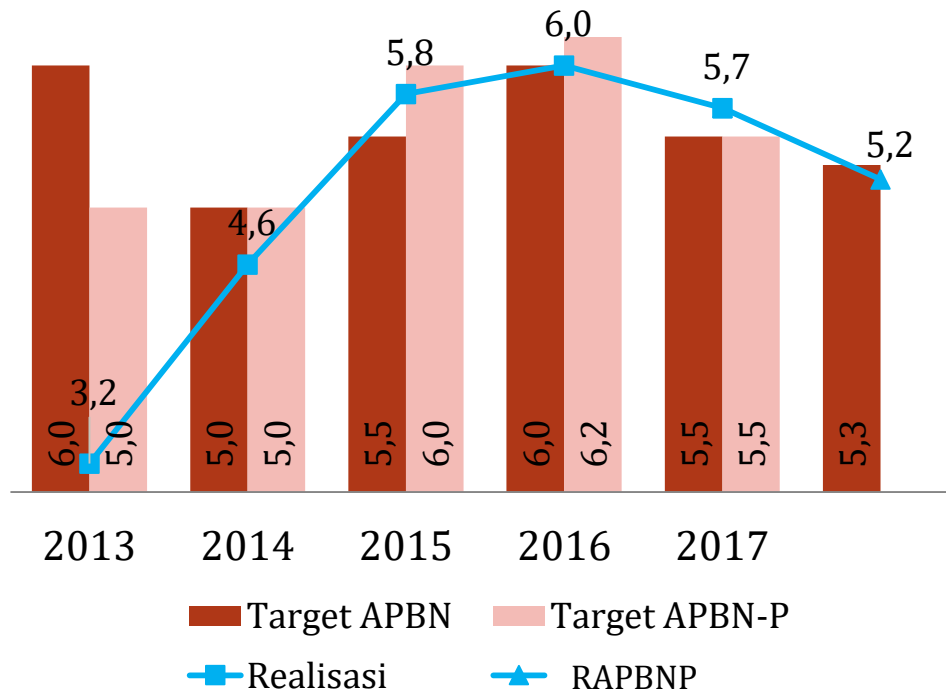
Faktor risiko yang diperkirakan masih akan membayangi dipengaruhi oleh:

- Perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang mendorong *flight to quality* ke AS dalam jangka panjang.
- Suku bunga acuan FFR AS kembali dinaikkan 25 bps menjadi 1,25% pada tanggal 14 Juni 2017. Diperkirakan FFR akan naik 1 kali lagi menjadi 1,4-1,6% di akhir tahun 2017.



Rata-rata Suku Bunga SPN 3 Bulan Tahun 2017 Diperkirakan Mencapai 5,2 persen

Suku bunga SPN 3 Bulan (%)



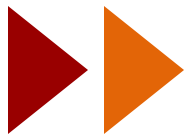
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat suku bunga SPN 3 bulan:

Faktor Global

- Suku bunga acuan FFR AS kembali dinaikkan 25 bps menjadi 1,25% pada tanggal 14 Juni 2017. Diperkirakan FFR akan naik 1 kali lagi menjadi 1,4-1,6% di akhir tahun 2017.
- Kondisi likuiditas di pasar keuangan global diperkirakan masih akan didukung oleh pelonggaran moneter di Zona Eropa, Inggris, dan Jepang.

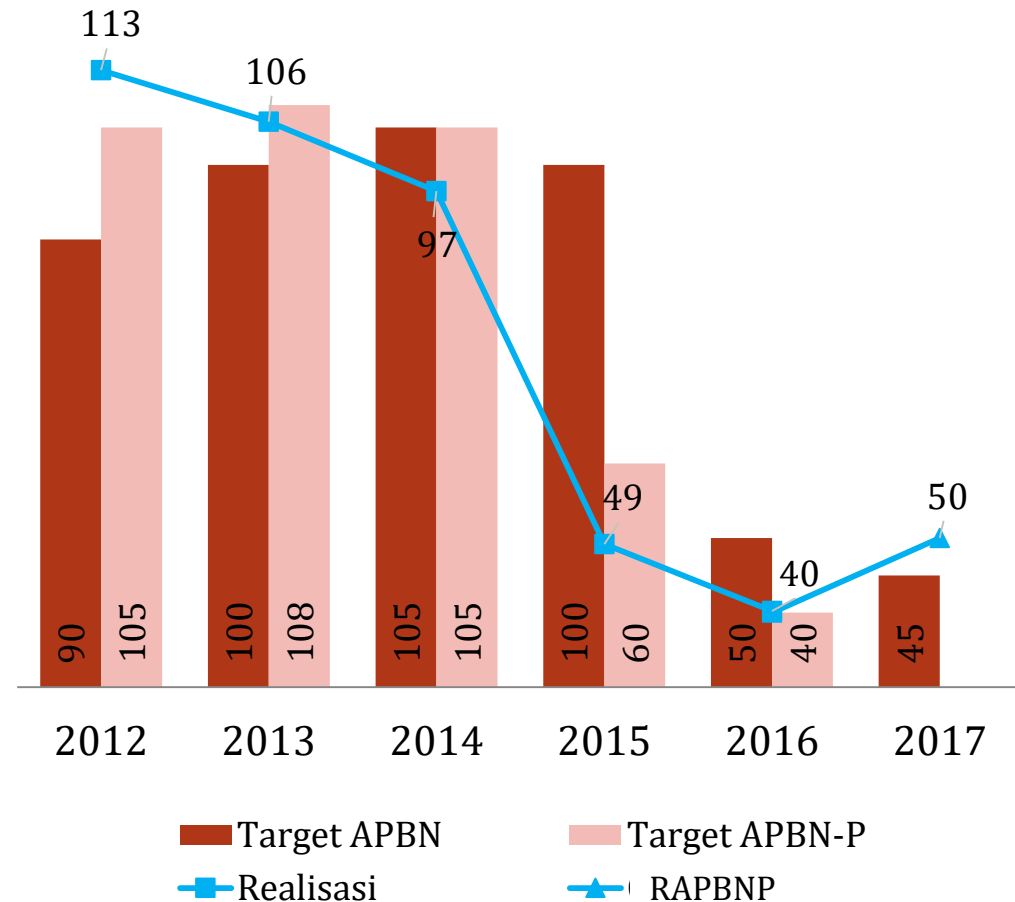
Faktor Domestik

- Inflasi domestik masih terkendali ($4\% \pm 1\%$) dan potensi kenaikan FFR memperkecil ruang BI untuk menaikkan suku bunga acuan 7-DRR.
- Kebijakan *front loading* dan penerbitan SPN yang lebih sering dinilai positif.
- Daya serap pemodal lembaga domestik relatif meningkat.
- *Upgrade* rating oleh S&P.



Rata-rata ICP tahun 2017 diperkirakan mencapai US\$50/barrel

Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barrel)

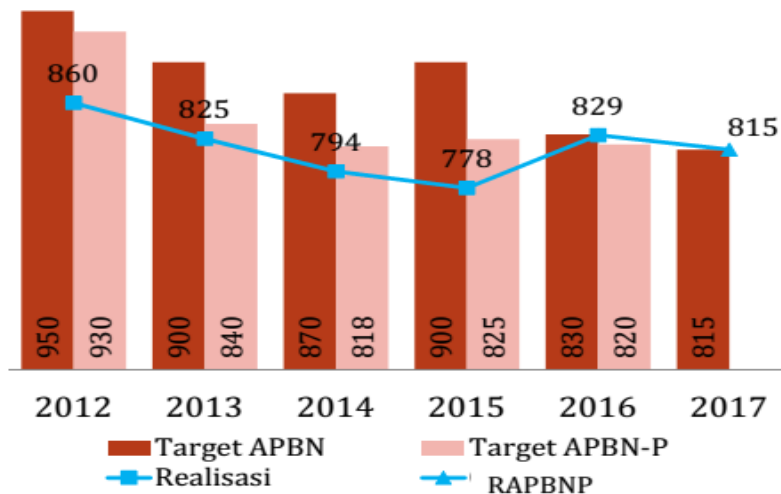


Faktor-faktor yang mempengaruhi harga ICP:

- Anggota OPEC bersepakat memperpanjang pemangkasan produksi, namun pasar masih pesimis, sehingga belum ada perbaikan harga.
- Partisipasi negara Non-OPEC dalam pemangkasan produksi minyak mentah menurun, hingga saat ini hanya Rusia yang bersepakat.
- Peningkatan produksi minyak mentah AS menyamai jumlah kesepakatan pemotongan minyak mentah.
- Peningkatan produksi Libya dan Nigeria seiring dengan meredanya gangguan geopolitik.
- Tingkat konsumsi negara-negara Asia yang masih stabil dan belum menunjukkan peningkatan.
- Tingkat konsumsi menjelang liburan musim panas lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016.
- Pemutusan hubungan negara-negara Timur Tengah dengan Qatar tidak berpengaruh terhadap kinerja OPEC dan harga minyak mentah dunia.

Lifting Minyak dan Gas dalam tahun 2017 Diperkirakan Mencapai 815 Ribu Barel Per Hari dan 1.150 Ribu Barel Setara Minyak Per Hari

Lifting Minyak (ribu barel/hari)

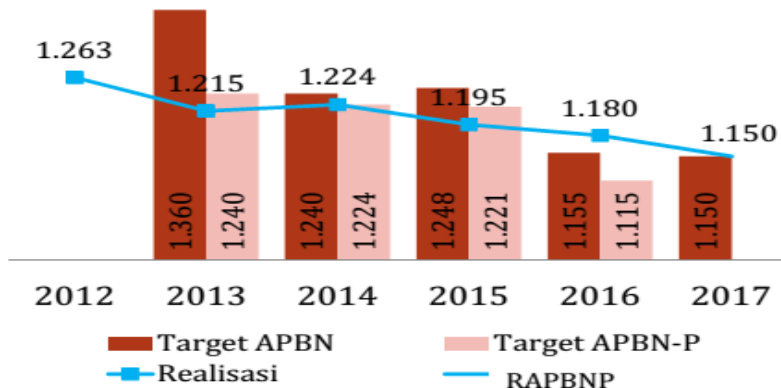


Faktor yang mempengaruhi lifting minyak:

- Penurunan aktivitas investasi di hulu migas disertai dengan rendahnya rasio kesuksesan eksplorasi, sehingga cadangan minyak nasional semakin menipis
- Kinerja produksi/*lifting* terutama ditopang oleh optimalisasi Lapangan Banyu Urip, namun sebagian besar lapangan migas lainnya banyak mengandalkan sumur yang berusia tua,

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan lifting minyak antara lain: kegiatan kerja ulang, perawatan sumur, optimasi fasilitas produksi, serta penerapan teknologi produksi yang tepat guna

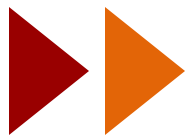
Lifting Gas (Ribu Barel setara minyak/hari)



Faktor yang mempengaruhi *lifting* gas:

- Kinerja *Lifting* gas relatif stabil dimana produksi gas masih ditopang oleh lapangan gas yang memiliki kontrak penjualan jangka panjang.
- Beberapa lapangan gas juga mengalami penurunan produksi alamiahnya berkisar 1,5-7% per tahun namun terkompensasi dengan beberapa lapangan gas yang akan *onstream* pada 2018 antara lain: Blok A Aceh, Blok Madura BD, dan Blok MDA-MBH

Faktor risiko a.l. rendahnya penyerapan kargo gas yang belum memiliki komitmen penjualan (*uncontracted gas*), dan perlunya dukungan infrastruktur yang memadai untuk menggali potensi Lapangan Gas di wilayah Timur



Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBNP Tahun 2017

Indikator	2015	2016	2017		
	Realisasi	Realisasi	APBN	Realisasi Semester I	RAPBNP
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	4,9	5,0	5,1	5,01 ^{*)}	5,2
b. Inflasi (% , yoy)	3,4	3,0	4,0	4,37	4,3
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	6,0	5,7	5,3	5,1	5,2
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	13.392	13.307	13.300	13.331	13.400
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	49	40	45	48,9	50
f. <i>Lifting</i> Minyak (ribu barell per hari)	778	829	815	784,2 ^{**)}	815
g. <i>Lifting</i> Gas (ribu barell setara minyak per hari)	1.195	1.180	1.150	1094,4 ^{**)}	1.150

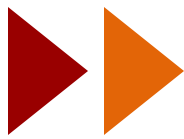
^{*)} realisasi Triwulan I

^{**)} *lifting* migas periode Jan-Mei 2017

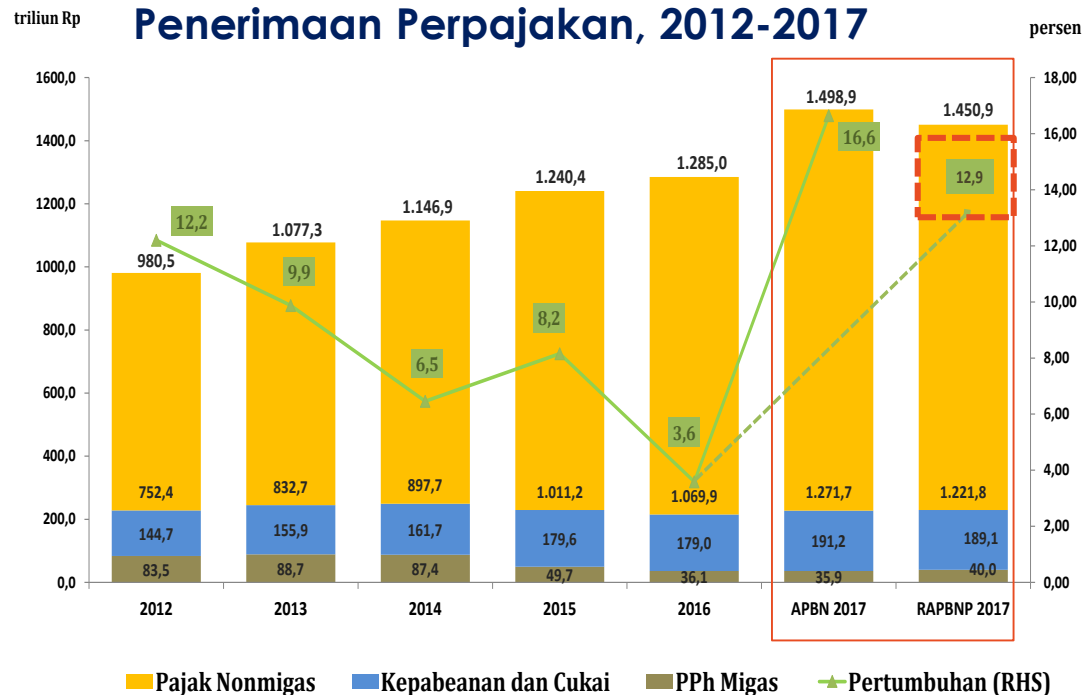


2

POKOK-POKOK PERUBAHAN KEBIJAKAN FISKAL RAPBNP 2017



Perluasan basis pajak berdasarkan harta deklarasi program tax amnesty diharapkan dapat menopang pencapaian target pajak



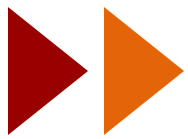
Semester I tahun 2017:

- Realisasi Penerimaan Perpajakan mencapai Rp571,9 T atau naik 9,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
- Membayarnya capaian penerimaan perpajakan diharapkan akan berlanjut s.d. akhir tahun.
- Namun, perlu *extra effort* untuk mencapai pertumbuhan 16,6 persen seperti target dalam APBN 2017.

RAPBNP 2017:

- Target pertumbuhan penerimaan perpajakan dikoreksi turun menjadi 12,9 persen atau turun Rp50 T (namun tetap lebih tinggi dari pencapaian di tahun 2016 serta pertumbuhan sejak tahun 2012);
- Kepabeanan dan cukai turun Rp2 T dari APBN tahun 2017, namun diharapkan tetap tumbuh 5,7 persen

Uraian (Triliun Rupiah)	2016			2017		
	APBNP	Real s.d. 30 Juni	% thd APBNP	APBN	Real s.d. 30 Juni	% thd APBN
1. PPh	855,8	286,8	33,5	787,7	314,3	39,9
2. PPN dan PPnBM	474,2	169,2	35,7	493,9	192,0	38,9
3. Pajak Lainnya	25,1	4,7	18,7	26,0	3,9	15,0
4. Kepabeanan dan Cukai	184,0	61,3	33,3	191,2	61,7	32,2
Total Perpajakan	1.539,2	522,0	33,9	1.498,9	571,9	38,2

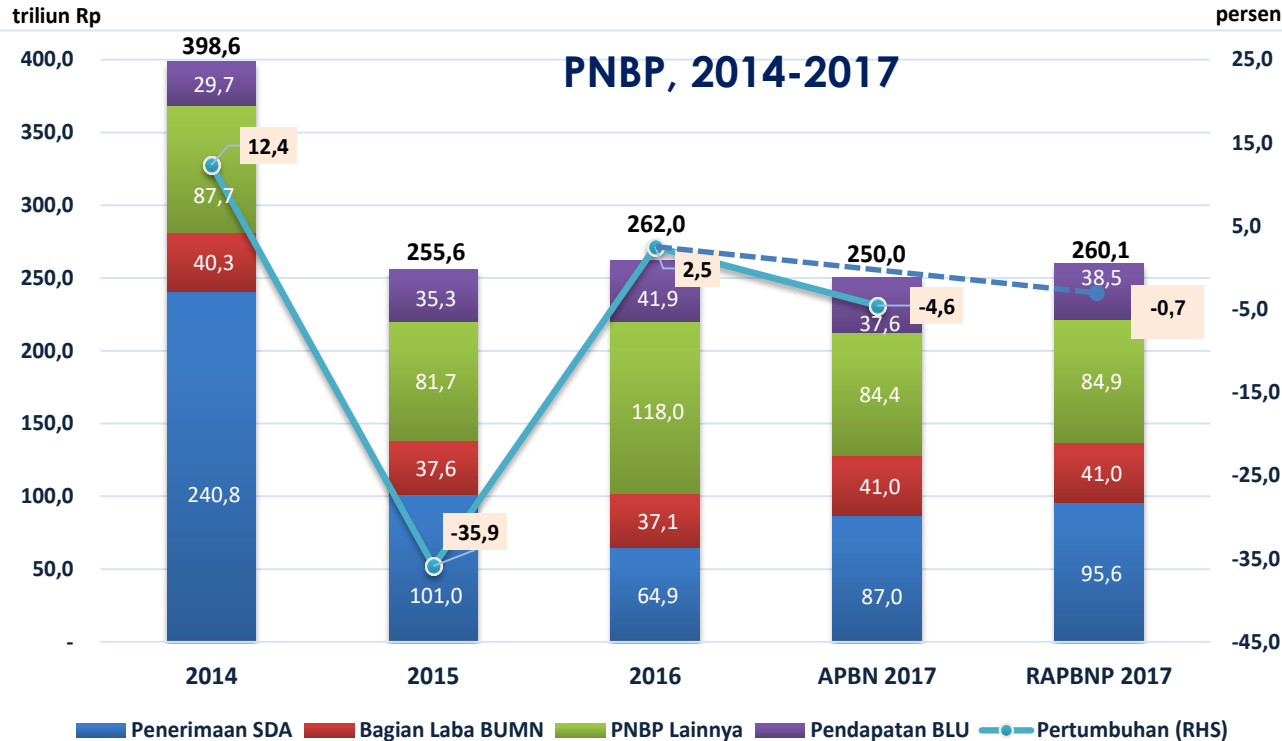


Target Penerimaan Pajak Nonmigas disesuaikan turun Rp50 T agar lebih realistis, sejalan dengan pencapaian pada 2016 serta *effort* tahun 2017

Penerimaan Perpajakan (triliun Rupiah)	2016		2017			
	LKPP Audited	growth (%)	APBN	RAPBNP	% thd APBN	growth (%)
1. PPh MIGAS	36,1	(27,3)	35,9	40,0	111,3	10,8
2. PAJAK NON MIGAS	1.069,9	5,8	1.271,7	1.221,8	96,1	14,2
a. PPh Non Migas	630,1	14,0	751,8	722,2	96,1	14,6
b. Pajak pertambahan nilai	412,2	(2,7)	493,9	475,5	96,3	15,3
c. Pajak bumi dan bangunan	19,4	(33,5)	17,3	15,4	89,1	(20,7)
d. Pajak lainnya	8,1	45,6	8,7	8,7	99,4	7,3
3. KEPABEANAN DAN CUKAI	179,0	(0,3)	191,2	189,1	98,9	5,7
a. Cukai	143,5	(0,8)	157,2	153,2	97,5	6,7
b. Bea masuk	32,5	4,0	33,7	33,3	98,6	2,5
c. Bea keluar	3,0	(19,5)	0,3	2,7	793,9	(10,0)
JUMLAH	1.285,0	3,6	1.498,9	1.450,9	96,8	12,9

1. PPh Migas ditargetkan naik sebagai dampak kenaikan harga minyak;
2. Pertumbuhan Pajak nonmigas didukung:
 - ✓ Peningkatan ekonomi
 - ✓ Basis Pajak yang lebih baik oleh kebijakan tax amnesty
 - ✓ Reformasi Perpajakan (regulasi, IT dan manajemen SDM/organisasi)
3. Penyesuaian turun target Cukai oleh berkurangnya produksi rokok dan belum dapat dipungutnya sumber cukai yang baru

Proporsi penerimaan SDA terhadap total PNBPN menurun drastis di tahun 2015, namun meningkat di 2017 karena kecenderungan kenaikan harga minyak



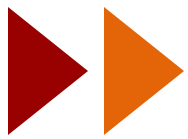
Semester I tahun 2017:

- Realisasi PNBPN telah mencapai Rp146,1 T atau naik 30,3 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.
- Realisasi harga minyak sampai dengan Juni 2017 mencapai US\$49/barel (lebih tinggi dari asumsi APBN 2017).

RAPBNP 2017:

- Penerimaan SDA** tahun 2017 diperkirakan meningkat mendekati Rp100 T (meningkat 9,9% dari target APBNnya);
- Kebijakan untuk mempertahankan *lifting* migas antara lain melalui pengembangan lapangan *onstream* tepat waktu.

Uraian (Triliun Rupiah)	2016			2017		
	APBNP	Real s.d. 30 Juni	% thd APBNP	APBN	Real s.d. 30 Juni	% thd APBN
1. PNBPN SDA	90,5	27,4	30,2	87,0	52,4	60,2
2. Pend. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	34,2	24,8	72,7	41,0	31,5	76,7
3. PNBPN Lainnya dan Pend. BLU	120,4	59,9	49,7	122,0	62,3	51,0
Total PNBPN	245,1	112,1	45,7	250,0	146,1	58,4



Target PNBП diperkirakan meningkat Rp10,1 T utamanya oleh kenaikan harga minyak

PNBP (triliun Rupiah)	2016	2017		
	LKPP Audited	APBN	RAPBNP	% thd APBN
1. Pendapatan SDA	64,9	87,0	95,6	109,9
a. SDA Migas	44,1	63,7	72,2	113,3
- Minyak bumi	31,4	50,1	57,4	114,5
- Gas Bumi	12,6	13,6	14,8	108,7
b. Non Migas	20,8	23,3	23,4	100,6
- Pertambangan Minerba	15,8	17,7	17,9	100,7
- Panas Bumi	0,9	0,7	0,7	101,8
- Kehutanan	3,8	3,9	4,0	100,3
- Perikanan	0,4	1,0	1,0	100,0
2. Pendapatan Bagian Laba BUMN	37,1	41,0	41,0	100,0
3. PNBП Lainnya	118,0	84,4	84,9	100,6
4. Pendapatan BLU	41,9	37,6	38,5	102,5
JUMLAH	262,0	250,0	260,1	104,0

PNBP SDA Migas naik Rp8,5 T dipengaruhi oleh:

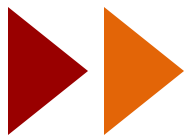
- perubahan ICP dari asumsi US\$45/barel menjadi US\$50/barel
- Nilai tukar rupiah melemah dari asumsi Rp13.300/US\$ menjadi Rp13.400/US\$

PNBP SDA Non Migas naik Rp0,1 T disebabkan tren kenaikan harga komoditas tambang

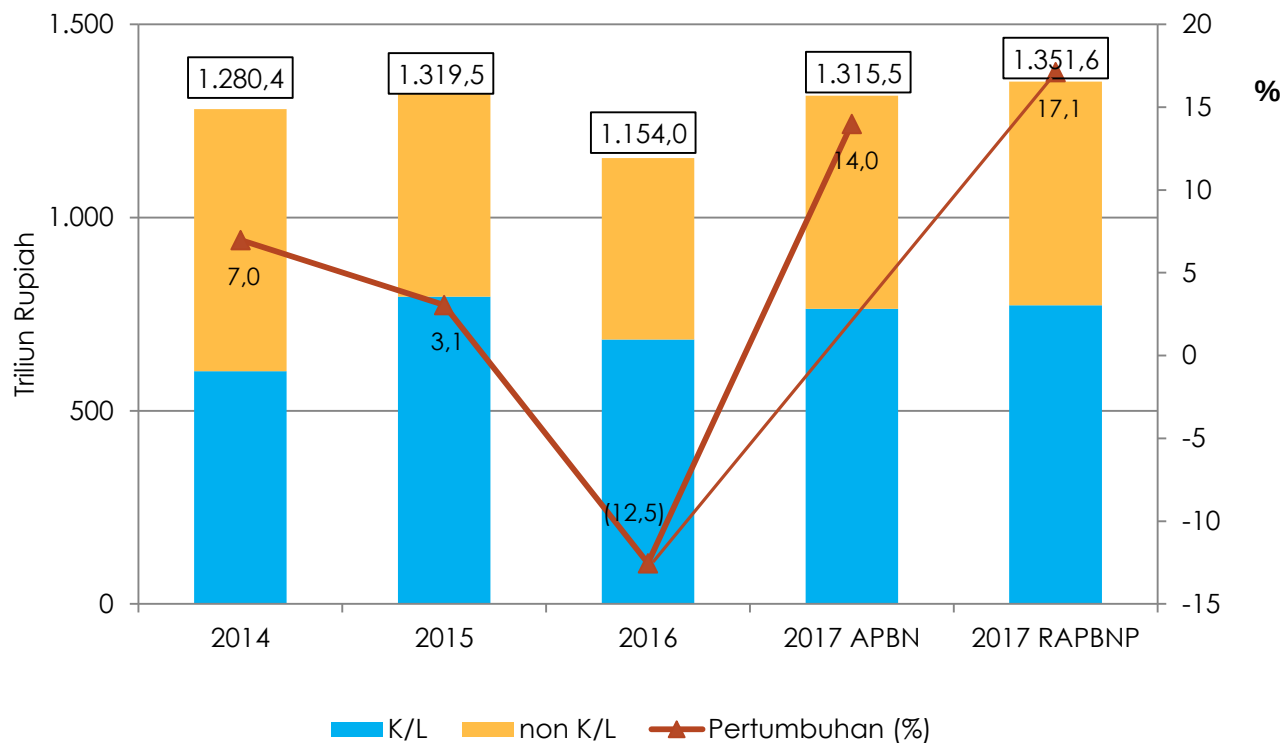
PNBP Lainnya naik Rp0,5 T, a.l. karena:

- Tambahan bagian Pemerintah dari surplus BI Rp1,7 T
- Pergeseran PNBП K/L menjadi Pendapatan BLU

PNBP Lainnya a.l. terdiri dari **PNBP K/L**, Penjualan Hasil Tambang (PHT) KESDM, dan Domestic Market Obligation.



Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tahun 2017 tumbuh paling tinggi dalam 4 tahun terakhir.



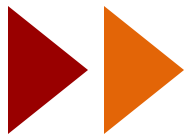
Semester I tahun 2017:

- Realisasi BPP mencapai Rp498,6 T atau 37,9% terhadap APBNnya, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2016
- Pemerintah melanjutkan kebijakan efisiensi belanja barang K/L serta tambahan belanja prioritas K/L.

RAPBNP 2017:

- Berdasarkan realisasi semester I tersebut, BPP diperkirakan naik Rp36,1 T menjadi Rp1.351,6 T;
- Menampung belanja prioritas dan tambahan subsidi;
- Namun, dengan mempertimbangkan alokasi anggaran K/L yang tidak terserap secara alamiah (berdasarkan pola tahunan) sekitar 3-4%, maka realisasi BPP akan menjadi Rp1.327,7 T.

Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)	2016			2017		
	APBNP	Realisasi Semester I	% thd APBNP	APBN	Realisasi Semester I	% thd APBN
1. Belanja K/L	767,8	262,8	34,2	763,6	263,9	34,6
2. Belanja Non K/L	538,9	218,5	40,6	552,0	234,6	42,5
a.l. - Subsidi	177,8	72,3	40,7	160,1	58,7	36,7
JUMLAH	1.306,7	481,3	36,8	1.315,5	498,6	37,9



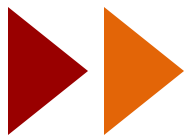
Realisasi Belanja 15 K/L besar dalam semester I 2017 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2016

Triliun Rupiah

No.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2016			2017		
		APBNP	Realisasi Semester I	% thd APBNP	APBN	Realisasi Semester I	% thd APBN
1	KEMENHAN	108,7	40,1	36,9	108,0	39,3	36,4
2	KEMEN PU PERA	97,1	28,5	29,3	101,5	30,8	30,4
3	POLRI	79,3	31,4	39,6	84,0	30,9	36,8
4	KEMENAG	56,2	21,7	38,7	60,2	23,0	38,2
5	KEMENKES	62,7	23,3	37,1	58,3	23,0	39,5
6	KEMENHUB	42,9	11,1	25,8	46,0	12,4	26,9
7	KEMENKEU	38,1	15,8	41,4	40,8	18,5	45,3
8	KEMENRISTEK DIKTI	40,6	14,0	34,6	39,7	14,0	35,3
9	KEMENDIKBUD	43,6	14,6	33,5	39,8	14,6	36,6
10	KEMENTAN	27,6	9,4	33,9	22,1	8,2	37,3
11	KEMENSOS	13,1	5,4	41,0	17,5	7,7	43,8
12	KEMENKUMHAM	11,3	3,8	33,7	9,4	3,6	38,0
13	KKP	10,6	2,1	20,2	9,3	1,5	15,8
14	MA	8,8	3,9	44,5	8,2	3,6	43,7
15	KEMENLU	7,0	2,4	34,4	7,4	2,6	35,7
15 K/L dengan Pagu Terbesar		647,5	227,4	35,1	652,2	233,6	35,8
K/L Lainnya		120,3	35,4	29,4	111,4	30,3	27,2
JUMLAH		767,8	262,8	34,2	763,6	263,9	34,6

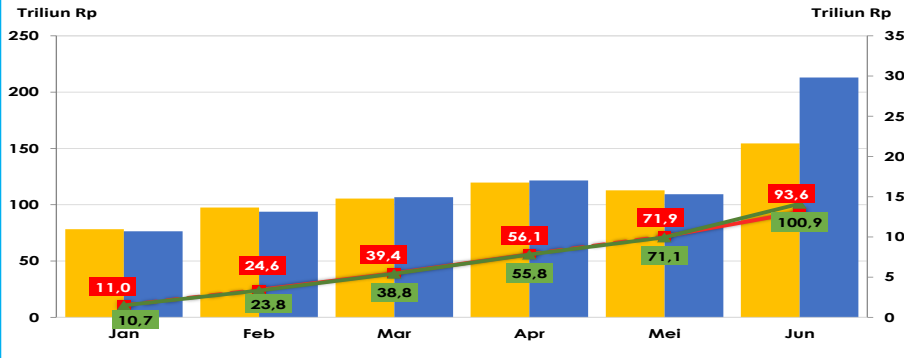
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L:

1. Pembayaran THR bagi PNS
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini
3. Pencairan berbagai program perlindungan sosial (KIP, KIS, dan PKH)



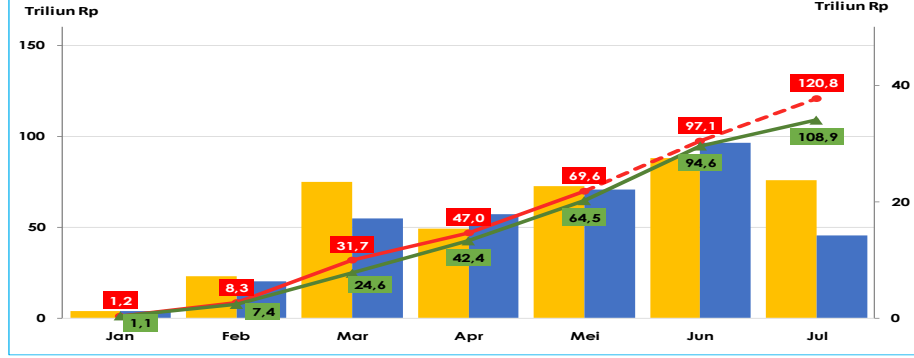
Realisasi Belanja Barang dan Modal K/L Semester I tahun 2017 menunjukkan keberhasilan percepatan pelaksanaan anggaran

BELANJA PEGAWAI



Tidak termasuk Belanja Pegawai Non-K/L (a.l pensiun, jaminan kesehatan, JKK, dan JKM) sebesar Rp63,7 T di realisasi s.d 30 Juni 2017

BELANJA BARANG



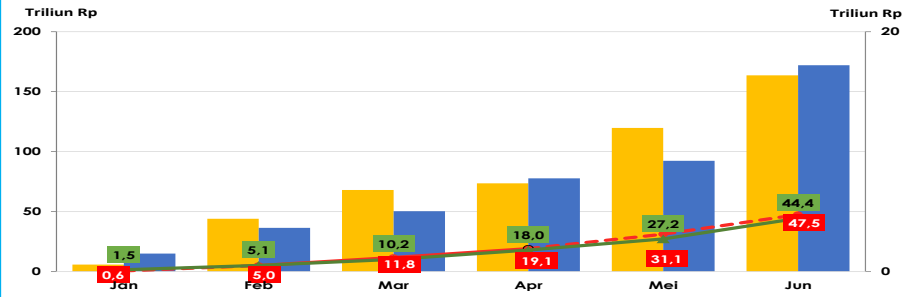
2017 perkiraan bulanan (RHS)

2016 bulanan (RHS)

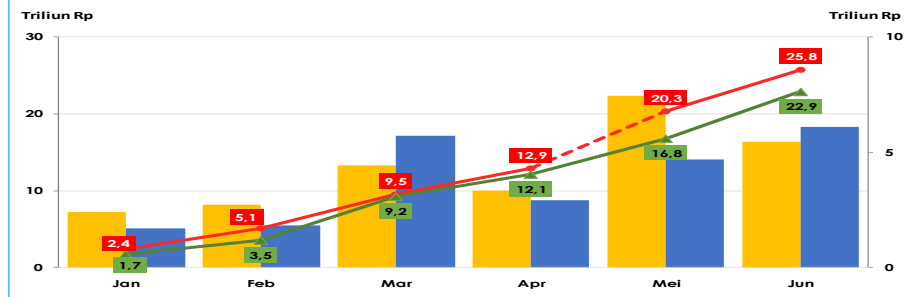
2017 perkiraan akumulasi (LHS)

2016 akumulasi (LHS)

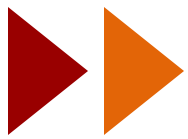
BELANJA MODAL



BANTUAN SOSIAL



Uraian (triliun rupiah)	2016			2017		
	APBNP	Realisasi Semester I	% thd APBNP	APBN	Realisasi Semester I	% thd APBN
Bel. Pegawai	209,0	100,9	48,3	220,2	93,6	42,5
Bel. Barang	302,8	94,6	31,2	296,2	97,1	32,8
Bel. Modal	206,6	44,4	21,5	194,3	47,5	24,4
Bansos	49,4	22,9	46,4	53,0	25,8	48,7
Jumlah	767,8	262,8	34,2	763,6	263,9	34,6



Penghematan Belanja Barang K/L dilakukan, untuk direalokasi ke belanja yang mendesak & produktif

Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)	2016	2017				
	LKPP Audited	APBN	RAPBNP	% thd APBN	Outlook	% thd APBN
1. Belanja K/L	684,2	763,6	773,1	101,2	743,7	97,4
2. Belanja Non K/L	469,8	552,0	578,5	104,8	584,0	105,8
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	182,8	221,2	219,2	99,1	218,6	98,8
b. Subsidi	174,2	160,1	182,1	113,8	182,1	113,8
(1) Subsidi Energi	106,8	77,3	103,1	133,4	103,1	133,4
(2) Subsidi Non Energi	67,4	82,7	79,0	95,5	79,0	95,5
c. Belanja Hibah	7,1	2,2	5,5	251,6	5,5	251,6
d. Belanja Lain-Lain	6,0	41,0	46,7	114,1	52,9	129,0
JUMLAH	1.154,0	1.315,5	1.351,6	102,7	1.327,7	100,9

RAPBNP 2017

Belanja K/L naik Rp9,5 T karena:

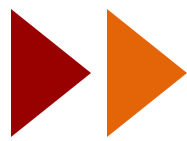
- penghematan Belanja Barang K/L Rp16 T;
- Tambahan belanja prioritas K/L Rp11,7 T;
- Tambahan lainnya (PHLN, PNBP, BLU) Rp13,8 T.

Belanja Non K/L naik Rp26,5 T karena:

- Kenaikan subsidi Rp22,1 T;
- Kenaikan hibah Rp3,3 T (a.l. realokasi dari cadangan bencana);
- Kenaikan belanja lain-lain Rp5,7 T.

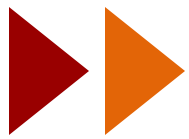
Outlook 2017:

Belanja K/L turun Rp29,4 T karena alokasi anggaran yang tidak terserap secara alamiah (berdasarkan pola tahunan) sekitar 3-4% → realisasi 96-97% dari pagu



Kebijakan Fiskal Belanja dalam RAPBNP 2017

- ☐ **Efisiensi Belanja barang sebesar Rp16,0 T** (melalui Inpres 4/2017), bersumber dari **Rupiah Murni**, pada komponen berikut :
 1. Belanja honorarium, perjalanan dinas, dan paket meeting
 2. Langganan daya dan jasa,
 3. Honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan,
 4. Operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor
- ☐ Penghematan Pembayaran Bunga Utang
- ☐ Penghematan Subsidi Bunga Kredit Program
- ☐ Memenuhi kebutuhan belanja prioritas dan mendesak a.l. ;
 - ✓ Percepatan sertifikasi tanah, persiapan Pilkada 2018 dan pemilu 2019, dan kegiatan budidaya pertanian;
 - ✓ Persiapan pelaksanaan ASIAN Games 2018;
 - ✓ Pemenuhan kekurangan anggaran TPG, Pengembalian BLU Kelapa Sawit, dan Cadangan bencana alam.
- ☐ Penambahan belanja hibah (perubahan rencana penarikan PHLN dan realokasi dari cadangan bencana);
- ☐ Realokasi penyelesaian defisit DJS-BPJS Kesehatan dari pembiayaan ke belanja (sesuai masukan BPK)

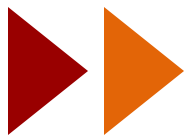


Rincian Perubahan Belanja K/L Tahun 2017

Triliun rupiah

No	Uraian	RAPBNP
1	Belanja K/L dalam APBN 2017	763,6
2	Perubahan	9,5
	a. Efisiensi Belanja Barang K/L	(16,0)
	b. Realokasi dari BABUN	3,1
	c. Tambahan belanja prioritas K/L	11,7
	d. Tambahan belanja pendidikan K/L	4,6
	e. Perubahan Pagu Penggunaan PNBPN/BLU	(0,03)
	f. Perubahan Pagu PHLN	3,5
	g. Perubahan Pagu PHDN	1,4
	h. Perubahan Pagu SBSN PBS	1,2
3	Proyeksi Pagu RAPBNP 2017	773,1
4	Perkiraan alokasi yang tidak terserap (alamiah)	(29,4)
5	Proyeksi Outlook Belanja K/L s.d. Akhir Tahun	743,7

Perubahan pagu PHLN, PHDN, dan SBSN PBS sesuai dengan usulan revisi yang telah diproses sampai dengan 16 Juni 2017.



Peningkatan Subsidi Energi harus diseimbangkan dengan program lainnya untuk perlindungan masyarakat miskin dan rentan (khususnya di bidang Pendidikan dan Kesehatan)

Subsidi (triliun Rupiah)	2016	2017		
	LKPP Audited	APBN	RAPBNP	% thd APBN
A. Subsidi Energi	106,8	77,3	103,1	133,4
1. Subsidi BBM & LPG	43,7	32,3	51,1	158,1
a) Subsidi BBM tahun berjalan	18,8	10,3	10,6	102,7
b) Subsidi LPG tahun berjalan	24,9	22,0	40,5	184,1
2. Subsidi Listrik	63,1	45,0	52,0	115,6
B. Subsidi Non Energi	67,4	82,7	79,0	95,5
1) Pangan	22,1	19,8	19,8	100,0
2) Pupuk	26,9	31,2	31,2	100,0
3) Benih	0,4	1,3	1,3	100,0
4) PSO	3,7	4,3	4,3	100,0
5) Subsidi Bunga Kredit Program	5,1	15,8	13,0	82,2
6) Subsidi Pajak / Pajak DTP	9,3	10,3	9,4	91,2
JUMLAH	174,2	160,1	182,1	113,8

Kenaikan Subsidi BBM & LPG :

- a. Dampak Perubahan parameter subsidi → Rp4,6 T
- b. Penundaan penyesuaian harga jual eceran LPG tabung 3 kg Rp1.000/kg;
- c. Tidak berjalannya kebijakan pembatasan alokasi subsidi LPG tabung 3 Kg (distribusi tertutup) → Rp10 T

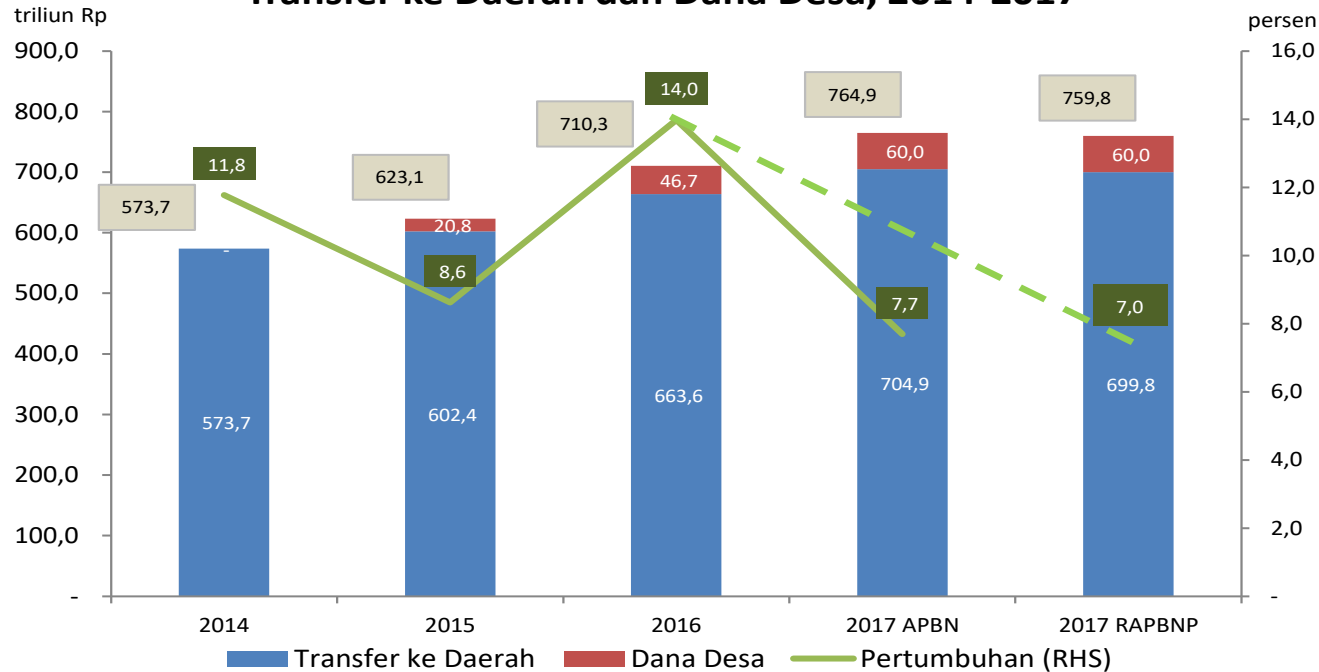
Kenaikan Subsidi Listrik :

- Perubahan asumsi Rp1,4 T;
- pembatasan subsidi listrik untuk pelanggan RT 450 VA tidak berjalan → Rp3,9 T
- Alokasi untuk pembayaran kembali kepada pelanggan RT 900 VA yang layak menerima subsidi Rp1,7 T

- Subsidi bunga kredit perumahan turun Rp1,7 T;
- Subsidi bantuan uang muka perumahan turun Rp1,0 T.

RAPBNP 2017 Transfer ke Daerah dan Dana Desa tumbuh 7,0% dari tahun sebelumnya

Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2014-2017



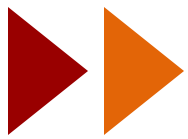
Semester I tahun 2017:

- Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa semester I 2017 sebesar Rp394,8 T atau 51,6% terhadap APBNnya, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2016

RAPBNP 2017:

- Pemerintah mengalokasikan pembayaran kurang bayar DBH sampai dengan tahun 2015 Rp3 T dan DAK Fisik Rp11,2 T.
- Berdasarkan realisasi semester I tersebut, Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun Rp5,1 T menjadi Rp759,8 T.

URAIAN (Triliun Rupiah)	2016			2017		
	APBNP	Realisasi Semester I	% thd APBNP	APBN	Realisasi Semester I	% thd APBN
A. TRANSFER KE DAERAH	729,3	357,2	49,0	704,9	360,4	51,1
I. DANA PERIMBANGAN	705,5	348,7	49,4	677,1	349,4	51,6
II. DANA INSENTIF DAERAH	5,0	2,9	58,1	7,5	4,5	59,8
III. DANA OTONOMI KHUSUS & DANA KEISTIMEWAAN D.I.Y	18,8	5,6	29,8	20,3	6,5	32,0
B. DANA DESA	47,0	26,8	57,1	60,0	34,4	57,3
J U M L A H	776,3	384,0	49,5	764,9	394,8	51,6



Perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa terutama dipengaruhi oleh turunnya Penerimaan DN Netto

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (triliun Rupiah)	2016	2017				
	LKPP Audited	APBN	RAPBNP	% thd APBN	Outlook	% thd APBN
A. Transfer ke Daerah	663,6	704,9	699,8	99,3	691,1	98,0
1. Dana Perimbangan	639,8	677,1	672,3	99,3	663,6	98,0
a. Dana Transfer Umum	475,9	503,6	487,7	96,8	487,7	96,8
1) Dana Bagi Hasil	90,5	92,8	95,4	102,8	95,4	102,8
2) Dana Alokasi Umum	385,4	410,8	392,3	95,5	392,3	95,5
b. Dana Transfer Khusus	163,9	173,4	184,6	106,5	176,0	101,5
1) Dana Alokasi Khusus Fisik	75,2	58,3	69,5	119,2	66,6	114,2
2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	88,7	115,1	115,1	100,0	109,3	95,0
2. Dana Insentif Daerah	5,0	7,5	7,5	100,0	7,5	100,0
3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y.	18,8	20,3	20,0	98,3	20,0	98,3
B. Dana Desa	46,7	60,0	60,0	100,0	58,2	97,0
JUMLAH	710,3	764,9	759,8	99,3	749,3	98,0

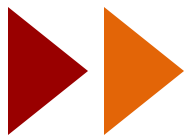
RAPBNP 2017

Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun Rp5,1 T karena:

- DAU tidak bersifat final (mengikuti perubahan pendapatan negara) → DAU turun Rp18,5 T;
- Peningkatan DBH karena kenaikan pendapatan yang dibagihasilkan serta menampung kurang bayar tahun 2015 Rp3 T;
- Peningkatan DAK Fisik Rp11,2 T, terutama untuk menampung kurang bayar DAK Fisik
- Penurunan Dana Otsus mengikuti penurunan DAU

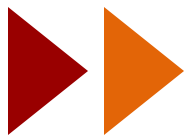
Outlook 2017

Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun Rp10,5 T karena alokasi anggaran yang tidak terserap secara alamiah DAK sebesar 5% dan Dana Desa 3% → realisasi 95-97% dari pagu



Defisit RAPBNP 2017 diperkirakan 2,92% thd PDB, namun dengan adanya penghematan alamiah pada Belanja K/L, DAK, dan Dana Desa, maka defisit menjadi 2,67% thd PDB

APBN (triliun Rupiah)	2016	2017				
	LKPP Audited	APBN	RAPBNP	% thd APBN	Outlook	% thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.555,9	1.750,3	1.714,1	97,9	1.714,1	97,9
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.546,9	1.748,9	1.711,0	97,8	1.711,0	97,8
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.285,0	1.498,9	1.450,9	96,8	1.450,9	96,8
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	262,0	250,0	260,1	104,0	260,1	104,0
II. PENERIMAAN HIBAH	9,0	1,4	3,1	226,4	3,1	226,4
B. BELANJA NEGARA	1.864,3	2.080,5	2.111,4	101,5	2.077,0	99,8
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.154,0	1.315,5	1.351,6	102,7	1.327,7	100,9
1. Belanja K/L	684,2	763,6	773,1	101,2	743,7	97,4
2. Belanja Non K/L	469,8	552,0	578,5	104,8	584,0	105,8
a.l. Subsidi	174,2	160,1	182,1	113,8	182,1	113,8
a. Subsidi Energi	106,8	77,3	103,1	133,4	103,1	133,4
b. Subsidi Non Energi	67,4	82,7	79,0	95,5	79,0	95,5
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	710,3	764,9	759,8	99,3	749,3	98,0
1. Transfer ke Daerah	663,6	704,9	699,8	99,3	691,1	98,0
2. Dana Desa	46,7	60,0	60,0	100,0	58,2	97,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(125,6)	(109,0)	(178,0)	163,4	(144,3)	132,4
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(308,3)	(330,2)	(397,2)	120,3	(362,9)	109,9
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,49)	(2,41)	(2,92)		(2,67)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)	334,5	330,2	397,2	120,3	362,9	109,9
I. PEMBIAYAAN UTANG	403,0	384,7	461,3	119,9	427,0	111,0
a.l - Surat Berharga Negara (neto)	407,3	400,0	467,3	116,8	433,0	108,2
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(89,1)	(47,5)	(59,7)	125,8	(59,7)	125,8
III. PEMBERIAN PINJAMAN	1,7	(6,4)	(3,7)	57,2	(3,7)	57,2
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(0,7)	(0,9)	(1,0)	108,8	(1,0)	108,8
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	19,6	0,3	0,3	100,0	0,3	100,0



Sejalan dengan pelebaran defisit RAPBNP 2017, SBN (neto) diperkirakan menjadi sekitar Rp433,0 T atau naik Rp33,0 T dengan asumsi ada penghematan alamiah

Pembiayaan Anggaran (triliun Rupiah)	2016	2017				
	LKPP Audited	APBN	RAPBNP	% thd APBN	Outlook	% thd APBN
I. PEMBIAYAAN UTANG	403,0	384,7	461,3	119,9	427,0	111,0
a. Surat Berharga Negara (neto)	407,3	400,0	467,3	116,8	433,0	108,2
b. Pinjaman (neto)	(4,3)	(15,3)	(6,0)	39,0	(6,0)	39,0
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(89,1)	(47,5)	(59,7)	125,8	(59,7)	125,8
a. Investasi kepada BUMN	(50,5)	(4,0)	(6,4)	159,5	(6,4)	159,5
b. Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya	(10,8)	(6,8)	(3,2)	47,1	(3,2)	47,1
c. Investasi kepada BLU	(25,3)	(34,7)	(48,2)	138,8	(48,2)	138,8
a.l. 1. PPDPP	(4,3)	(9,7)	(3,1)	32,0	(3,1)	32,0
2. LMAN	(16,0)	(20,0)	(32,1)	160,3	(32,1)	160,3
3. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(5,0)	(2,5)	(10,5)	420,0	(10,5)	420,0
d. Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	(3,8)	(2,0)	(2,0)	100,8	(2,0)	100,8
III. PEMBERIAN PINJAMAN	1,7	(6,4)	(3,7)	57,2	(3,7)	57,2
a. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	1,7	(6,4)	(3,7)	57,2	(3,7)	57,2
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(0,7)	(0,9)	(1,0)	108,8	(1,0)	108,8
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	19,6	0,3	0,3	100,0	0,3	100,0
a. Saldo Anggaran Lebih	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Hasil Pengelolaan Aset	0,6	0,3	0,3	100,0	0,3	100,0
JUMLAH	334,5	330,2	397,2	120,3	362,9	109,9

• Pembiayaan Utang:

Pinjaman neto menjadi sebesar Rp6,0 T, karena ada percepatan pembangunan infrastruktur.

• Pembiayaan Investasi:

✓ Investasi kepada BUMN naik Rp2,4 T menjadi Rp6,4 T karena PMN PT KAI Rp2,0 T dan PMN PT Jakarta Lloyd Rp379,3 M (non tunai).

✓ Investasi kepada BLU naik Rp13,5 T menjadi Rp48,2 T, a.l. karena:

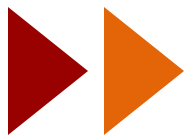
- ❖ Penurunan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp6,6 T;
- ❖ Tambahan **LMAN** Rp12,1 T;
- ❖ Tambahan **DPPN** Rp8,0 T (untuk SWF Pendidikan).

• Pemberian Pinjaman:

Turun Rp2,7 T a.l karena penyesuaian pinjaman kepada pemprov DKI Jakarta (proyek MRT).



TERIMA KASIH



RAPBNP 2017 : PNBK/L mengalami kenaikan disebabkan oleh tambahan bagian Pemerintah dari surplus BI dan TAYL.

Kementerian/Lembaga	2015	2016	2017	
			APBN	RAPBNP
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika	14,7	14,4	14,0	14,0
2. Kementerian Perhubungan	3,8	5,0	9,6	9,3
3. Kepolisian RI	3,8	4,4	7,5	7,5
4. Kementerian Pertahanan	-	0,4	4,8	3,9
5. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	2,6	3,5	3,1	3,1
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,2	3,4	2,9	2,9
7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN	1,9	2,0	2,3	2,3
8. Kementerian Agama	1,2	1,3	1,2	1,2
9. Kementerian Ketenagakerjaan	1,2	1,2	0,8	0,8
10. Kementerian Kesehatan	0,6	0,9	0,6	0,6
11. Kementerian/Lembaga Lainnya	28,4	65,5	17,2	20,5
Total PNBK/L	62,4	102,1	63,9	66,0

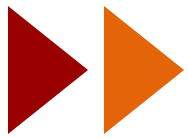
Pergeseran target PNBK sebesar Rp0,3 disebabkan perubahan Satker PNBK menjadi satker BLU.

Pergeseran target PNBK KemHan Rp0,9 T disebabkan perubahan Satker RSPAD Gatot Subroto menjadi satker BLU

Termasuk tambahan bagian Pemerintah dari surplus BI dan penerimaan TAYL.

Ket:

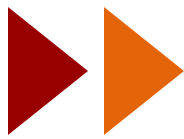
PNBK K/L diatas tidak termasuk Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Domestic Market Obligation (DMO)



Belanja 15 K/L Terbesar pada RAPBNP 2017

Miliar rupiah

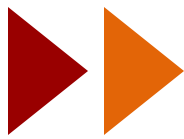
No.	Kementerian Negara/Lembaga	APBN 2017	PERUBAHAN									RAPBNP 2017
			EFISIENSI	REALOKASI BA BUN	TAMBAHAN BELANJA PRIORITAS K/L	TAMBAHAN PENDIDIKAN	PAGU PENGGUNAAN PNBP/BLU	PAGU PHLN	PAGU PHDN	SBSN	JUMLAH	
1	KEMENHAN	108.011,8	-	36,7	1.157,1	-	6,5	-	71,1	-	1.271,4	109.283,2
2	KEMEN PU / PERA	101.496,5	(517,8)	161,5	-	-	(0,3)	1.916,8	-	1.116,0	2.676,3	104.172,8
3	POLRI	84.007,7	-	-	-	-	(310,4)	-	315,4	-	5,0	84.012,8
4	KEMENAG	60.166,3	(1.389,0)	-	-	4.630,3	-	-	9,6	69,7	3.320,6	63.486,9
5	KEMENKES	58.267,1	(1.908,5)	-	-	-	-	10,9	-	-	(1.897,6)	56.369,6
6	KEMENHUB	45.983,7	(2.000,0)	-	354,7	-	263,5	-	-	-	(1.381,8)	44.601,9
7	KEMENKEU	40.774,1	(363,6)	99,6	-	-	10,9	20,4	-	-	(232,7)	40.541,5
8	KEMEN RISTEK / DIKTI	39.732,3	(1.480,0)	-	-	-	-	1.223,4	11,9	-	(244,7)	39.487,6
9	KEMENDIKBUD	39.823,1	(1.882,5)	-	-	-	-	24,5	-	-	(1.858,0)	37.965,1
10	KEMENTAN	22.107,1	(437,5)	5,2	2.471,2	-	-	0,3	-	-	2.039,3	24.146,4
11	KEMENSOS	17.525,3	(248,0)	-	-	-	-	0,5	41,2	-	(206,4)	17.318,9
12	KEMENHUKHAM	9.371,8	-	-	1.636,6	-	-	-	0,5	-	1.637,1	11.008,9
13	KKP	9.299,6	(352,0)	-	198,3	-	(8,0)	0,5	-	-	(161,3)	9.138,3
14	MA	8.181,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.181,3
15	KEMENLU	7.417,4	(249,4)	-	-	-	-	-	-	-	(249,4)	7.168,0
15 K/L TERBESAR		652.165,3	(10.828,3)	303,1	5.817,8	4.630,3	(37,9)	3.197,4	449,7	1.185,7	4.717,8	656.883,1
K/L LAINNYA		111.409,9	(5.171,7)	2.788,6	5.929,8	-	3,9	270,2	971,5	-	4.792,3	116.202,2
JUMLAH		763.575,1	(16.000,0)	3.091,7	11.747,7	4.630,3	(34,0)	3.467,5	1.421,2	1.185,7	9.510,1	773.085,3



Rincian efisiensi belanja barang pada K/L (sesuai kriteria tertentu) ... (1)

Miliar rupiah

No.	K/L	2015	2016	2017			
		Belanja Barang (RM)	Belanja Barang (RM)	APBN	Belanja Barang (RM)	Efisiensi	Pagu Belanja Barang Update
1	KEMENHUB	12.084,3	9.504,9	45.983,7	11.951,0	(2.000,0)	9.951,0
2	KEMENKES	8.378,4	10.880,3	58.267,1	13.435,1	(1.908,5)	11.526,6
3	KEMENDIKBUD	11.160,1	19.636,9	39.823,1	22.031,3	(1.882,5)	20.148,8
4	KEMENRISTEK DIKTI	6.986,3	8.343,0	39.732,3	10.942,8	(1.480,0)	9.462,8
5	KEMENAG	14.679,5	12.962,0	60.166,3	15.790,9	(1.389,0)	14.401,9
6	BKKBN	2.186,7	2.172,7	3.410,6	2.897,5	(700,0)	2.197,5
7	KEMEN PU PERA	12.756,3	15.129,6	101.496,5	20.232,9	(517,8)	19.715,1
8	KEMEN LHK	2.487,1	1.947,0	6.772,4	2.961,4	(468,9)	2.492,5
9	KEMEN ESDM	3.591,2	3.146,3	7.027,2	3.967,7	(461,1)	3.506,6
10	KEMENTAN	13.499,6	17.689,9	22.107,1	19.076,7	(437,5)	18.639,2
11	KEMENKEU	8.634,6	8.969,7	40.774,1	9.258,5	(363,6)	8.894,9
12	KKP	5.911,1	4.223,6	9.299,6	4.877,4	(352,0)	4.525,3
13	KEMEN PARIWISATA	1.786,3	2.948,5	3.824,0	3.199,8	(272,6)	2.927,2
14	KEMEN DESA, PDT, TRANS	4.162,7	3.330,3	4.852,7	3.977,7	(268,6)	3.709,1
15	KEMENLU	2.395,6	2.743,7	7.417,4	3.190,4	(249,4)	2.941,0
16	KEMENSOS	2.783,6	2.472,7	17.525,3	3.078,3	(248,0)	2.830,3
17	KEMEN NAKER	2.013,5	1.599,0	3.467,9	1.888,1	(235,9)	1.652,2
18	KEMENPERIN	1.749,6	1.040,5	2.827,9	1.406,8	(227,1)	1.179,7
19	BADAN EKONOMI KREATIF	-	319,1	906,4	865,0	(204,0)	661,0
20	BAKAMLA	-	148,1	955,8	336,2	(188,3)	147,9
21	BNPB	976,3	910,8	1.185,8	898,4	(167,6)	730,8
22	BPS	2.100,4	2.690,3	4.301,5	1.917,0	(167,5)	1.749,5
23	KEMENDAG	1.190,4	1.148,4	3.440,6	1.359,5	(166,2)	1.193,3
24	BADAN POM	445,2	538,0	1.796,8	865,2	(126,8)	738,4
25	KEMEN KOMINFO	707,4	720,2	4.753,6	880,8	(100,0)	780,8
26	KEMEN ATR/BPN	1.504,0	1.573,6	5.487,8	1.360,2	(92,2)	1.268,0
27	KEMENDAGRI	2.877,2	2.030,0	3.303,5	2.341,2	(89,5)	2.251,7
28	BMKG	640,4	602,7	1.593,0	696,6	(89,0)	607,6
29	BIG	168,9	207,4	845,0	309,4	(80,8)	228,6
30	BASARNAS	580,1	563,1	2.215,9	704,9	(73,6)	631,3



Rincian efisiensi belanja barang pada K/L (sesuai kriteria tertentu) ... (2)

Miliar rupiah

No.	K/L	2015	2016	2017			
		Belanja Barang (RM)	Belanja Barang (RM)	APBN	Belanja Barang (RM)	Efisiensi	Pagu Belanja Barang Update
31	BKPM	421,6	299,9	524,6	364,8	(70,8)	293,9
32	KEMEN PP DAN PA	164,4	550,9	573,1	531,6	(70,0)	461,5
33	LEMHANAS	149,2	110,2	298,3	176,5	(66,2)	110,2
34	LSN	192,0	186,2	1.128,0	250,5	(66,1)	184,5
35	KEMENKO BIDANG PMK	254,5	186,3	381,5	319,5	(60,0)	259,5
36	BNP2TKI	240,1	182,4	417,7	293,9	(50,0)	243,9
37	KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN	64,1	165,1	350,5	297,6	(50,0)	247,6
38	KEMEN PPN/BAPPENAS	366,8	306,7	1.360,8	409,5	(49,2)	360,3
39	KEMEN BUMN	64,1	119,3	243,9	183,1	(45,0)	138,1
40	KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN	164,6	229,5	350,4	273,2	(43,0)	230,2
41	KEMENKO BIDANG POLHUKAM	262,4	174,4	281,1	214,6	(40,0)	174,6
42	BPPT	303,1	262,4	1.140,2	303,4	(40,0)	263,4
43	BATAN	247,9	224,3	744,0	239,5	(38,1)	201,4
44	KEMENTERIAN SETNEG	1.225,1	1.344,7	1.688,1	866,4	(36,0)	830,4
45	BKN	158,0	140,5	625,8	195,1	(29,6)	165,5
46	LAPAN	204,9	205,9	698,7	239,4	(29,3)	210,1
47	KPPU	65,3	80,6	137,3	107,4	(26,9)	80,6
48	LPP TVRI	461,6	412,6	762,5	421,6	(25,2)	396,4
49	LIPI	369,9	312,0	1.124,7	331,3	(25,0)	306,3
50	LKPP	75,7	88,2	213,8	158,0	(23,6)	134,4
51	BSN	87,9	55,8	184,5	107,0	(20,0)	87,0
52	KEMEN PAN RB	74,7	79,3	203,5	137,6	(19,2)	118,4
53	LAN	80,5	87,6	300,1	112,7	(14,5)	98,2
54	BNPP	124,1	121,7	186,3	156,7	(13,1)	143,6
55	KEMEN KUKM	806,3	605,5	971,3	572,6	(10,5)	562,1
56	BPKP	400,7	348,7	1.439,9	273,2	(10,0)	263,2
57	BPLS	182,3	170,9	458,5	166,3	(10,0)	156,3
58	BAPETEN	56,8	79,6	181,9	104,3	(5,7)	98,6
59	SETKAB	68,6	81,3	219,7	107,9	(5,0)	102,9
JUMLAH		191.675,7	202.780,7	763.575,1	237.098,3	(16.000,0)	221.098,3

Dampak Pelaksanaan UU No. 23/2014 Terhadap Beban Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

SUDAH DIALOKASIKAN

Urusan Pemerintahan Konkuren: Dari Pemda ke Pemerintah Pusat

Uraian	K/L	Anggaran (miliar)	Keterangan
Penyuluh KB/petugas lapangan KB	BKKBN	Rp2.026,7	Akan dialokasikan mulai tahun 2018
penyuluhan perikanan nasional, penyelenggaraan karantina ikan, pengendali mutu, dan keamanan hasil perikanan	KKP	Rp373,3	Ditampung dalam RAPBNP tahun 2017 sebesar Rp198,2 miliar (6 bulan)
Pengelolaan terminal penumpang tipe A, penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor	Kemenhub	Rp569,5	Telah dialokasikan dalam APBN 2017
Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan, penyelenggaraan minyak dan gas bumi (Inspektur Migas)	ESDM	Rp71,9	

PROSES VERIFIKASI

Urusan Pemerintahan Konkuren: Dari Pemkab/Pemkot ke Pemprov



- Pendidikan Menengah
- Kehutanan
- Ketenagakerjaan
- ESDM, Perhubungan (sebagian 5 urusan)

Pengalihan urusan pemerintahan konkuren dari Kab/Kota ke Provinsi memerlukan anggaran **Rp19T – Rp20T**, namun **baru dipenuhi Rp15,4T** sehingga **kekurangan sebesar Rp3,6T – Rp4,6T**

Pengelolaan pendidikan tinggi kesehatan (71 PT)



- Pemda tidak diperbolehkan memiliki Perguruan Tinggi.
- 11 PT bergabung dengan Poltekkes Kemenkes
 - 60 PT dalam proses koordinasi penyelesaian

Kebutuhan anggaran masih dalam proses penilaian Kementerian Kesehatan
Berpotensi menambah beban anggaran Kemenkes dan Kemenristekdikti

DITUNDA

Urusan Pemerintahan Umum



Urusan Pemerintahan Umum pada Kemendagri (Kesbangpol)

Sesuai PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah → tetap menjadi beban APBD